

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin MR, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, dan Maya Shafira., 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV Laduny Alifatama, Lampung.
- Arifin, Zainal Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta.
- Asyhadie, Saeni dan Arief Rahman, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persadata, Jakarta.
- Asyhadie., Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Istanto, F.Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 60.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Pamekasan, Pulau Madura.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Sapto, Sigit, Nugroho, Mohamad Tohari, dan Mudji Rahardjo, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur.
- Sumardjono, Maria S.W, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM-Press, Yogyakarta.

Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Abdul, Gamal Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No.2, September, 2017.

Alfian, Tristan, Yayan Adi Saputro, dan Gun Sudiryanto, “Pengembangan Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dewa Watuaji”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Vol. 5, No.1, Oktober, 2021.

Asnan, Muhammad Fandi dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari Pemilik Tanah Sebelumnya”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No.1, September, 2023.

Dwi, Bagus Wahyudi dan Emmilia Rusdiana, “Penggunaan ‘Bujuk Rayu’ sebagai perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015), *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9, No. 2, September, 2022.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16. No. 3, Agustus, 2020.

Irma, Ade Suryani, “Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal”, *Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Jiwong, Yulianti, “Perolehan Sertifikat Hak Milik karena Jual Beli Tanah dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Magister Ilmu Hukum Agraria, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 3, No. 1, April, 2013.

Rahmat, E. Taufik, Agus David Ramdansyah, Zaenal Muttaqin, Bambang Dwi Suseno, & Roza Mulyadi, “Mengembangkan KEK Wisata Tanjung Lesung”, *Repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2016.

Rejekiingsih, Triana, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia)”, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2016.

Sariwati, Retno dan Ferry Anggriawan, “Implementasi Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik untuk Tanah Perumahan”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022.

Septia, Sanindia K.P, “Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Notary Journal, Vol. 2, No. 2, Mei, 2022.

Yudha, Haraif Putra, “Kepastian Hukum Peningkatan Status Hak Atas Tanah yang Dibebankan Hak Tanggungan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Solok)”, UNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA, Magister Hukum, LPPM Universitas Ekasakti Padang, Vol. 5, No.1, Juli, 2021.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6652)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

D. Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Aristo, Erly, 2018, *Peningkatan Hak Guna Bangunan Di atas Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Indonesia*, Laporan Akhir Penelitian Perintis Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Dewi, Anggita Mustika, 2019, *Perbandingan Pengaturan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Kepentingan Umum Antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun*. Thesis. Program Studi Magister Kenotariatan Hukum UGM, Yogyakarta.

Wendy Ayu Melati, 2021, *Nilai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang*”, Program Studi Diploma IV Pertanahan.

E. Internet

Alhamidi, Rifat, “DPR Dukung Tanjung Lesung masuk 10 Prioritas KSPN”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5594231/dpr-dukung-tanjung-lesung-masuk-10-prioritas-kspn>, diakses pada 5 Desember 2024.

Biro Humas dan Protokol NTB, Diskominfo NTB, “Presiden Joko Widodo Resmikan Beroperasinya KEK Mandalika”, <https://old.diskominfo.ntbprov.go.id/content/presiden-joko-widodo-resmikan-beroperasinya-kek-mandalika>, diakses pada 14 Oktober 2024.

Buana, Gana, KEK Tanjung Lesung: Peluang Investasi Properti untuk Warga Asing”, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/652334/kek-tanjung-lesung-peluang-investasi-properti-untuk-warga-asing>, diakses pada 28 September 2024.

Kemenparekraf/ Baparekraf RI, “Mengenal 6 Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Mengenal-6-Kawasan-Ekonomi-Khusus-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>, diakses pada 22 Maret 2024 dan 4 Desember 2024.

Kemenparekraf/Baparekraf RI, “Alasan Menparekraf Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas”, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Alasan-Menparekraf-Fokus-Kembangkan-5-Destinas-Super-Prioritas>, diakses pada 4 Desember 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Banten”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2679/peresmian-kawasan-ekonomi-khusus-tanjung-lesung-banten>, diakses pada 14 Oktober 2024.

Muthia, KFMAP, 2020, “Apakah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata?”, <https://kfmap.asia/blog/apakah-kawasan-ekonomi-khusus-kek-pariwisata/%20670>, diakses pada 22 Maret 2024.

Press Release Dewan Nasional KEK Republik Indonesia, “Resmi Beroperasi, KEK Singhasari Siap Gaet Penyelenggara Pendidikan Kelas Dunia”, <https://kek.go.id/media/press/Resmi-Beroperasi-KEK-Singhasari-Siap-Gaet-Penyelenggara-Pendidikan-Kelas-Dunia-344>, diakses pada 14 Oktober 2024.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Siaran Pers HM.05/17/SJ.DNKEK.03/09/2023, “Akselerasi Pembangunan dan Penerimaan Investasi, Kawasan Ekonomi Khusus Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dengan Target Investasi Rp 62,1 Triliun”, 2023, <https://kek.go.id/id/media/press/Akselerasi-Pembangunan-dan-Penerimaan-Investasi-Kawasan-Ekonomi-Khusus-Menjadi-Penggerak-Pertumbuhan-Ekonomi-Wilayah-dengan-Target-Investasi-Rp-621-Triliun-391>, diakses pada 26 Agustus 2024.

SEZ Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, “Kawasan Ekonomi Khusus”, <https://kek.go.id/id>, diakses pada 23 Oktober 2024.

Siaran Pers HM.4.6/12/SET.M.EKON.3/01/2024, Dewan Nasional KEK Selenggarakan “Rakernas KEK – Evaluasi Capaian Kinerja 2023 & Target 2024”: Kinerja yang Baik di 2023 dan Kontribusi Positif terhadap Ekonomi Daerah dan Perekonomian Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5597/dewan-nasional-kek-selenggarakan-rakernas-kek-evaluasi-capaian-kinerja-2023-target-2024-kinerja-yang-baik-di-2023-dan-kontribusi-positif-terhadap-ekonomi-daerah-dan-perekonomian-nasional>, diakses pada 18 Januari 2024.

Yusuf Laksono, Muhdany, Kompas.com, 2024, “KEK di Indonesia Ada Berapa? Ini Jawabannya”, <https://www.kompas.com/properti/read/2024/05/25/160000921/kek-di-indonesia-ada-berapa-ini-jawabannya?page=all>, diakses pada 31 Juli 2024.

F. Lain-lain

SEZ Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, “Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2020”.

SEZ Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, “Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2023”.